

### 10 DAERAH MASIH LEVEL 4:

Pengendara melintas dekat mural imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan di Jakarta, Selasa (20/7/2021). Kementerian Kesehatan mencatat pasien COVID-19 di Jakarta yang sembuh pada 19 Juli 2021 sebanyak 12.674 atau meningkat dibandingkan 18 Juli 2021 sebanyak 11.857 orang. Masih ada 10 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang masih menerapkan PPKM level 4. Salah satu faktornya, karena daerah tersebut berada di wilayah aglomerasi. (Liputan6.com)



### HADAPI GELOMBANG KE-3 CORONA:

## Komisi IX Minta Genjot Vaksinasi!

Jakarta, MIMBAR - Tren kasus Corona harian di Indonesia menurun, namun diprediksi gelombang ketiga Corona akan terjadi di Indonesia pada akhir Desember nanti.

Komisi IX DPR RI mengingatkan pemerintah agar mempersiapkan diri menghadapi gelombang ketiga Corona di Indonesia.

■ Bersambung ke Hal 11



Charles Honoris. (Foto Antara)

### SIAPKAN SANKSI:

## PDIP Incar Ganjar Dukungan Relawan?



Ganjar Pranowo dan Hastu Kristiyanto.

Jakarta, MIMBAR - PDIP menyatakan akan memberikan sanksi kepada kader yang didukung maju di Pilpres 2024 sebelum ada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

### PAKAH GANJAR?

Apakah PDIP mengincar H Ganjar Pranowo, SH, MIP (53) yang didukung maju di Pilpres 2024 oleh relawan?

■ Bersambung ke Hal 11

# PPKM Diperpanjang lagi hingga 4 Oktober



Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama Walikota Medan Bobby Nasution beberapa waktu lalu.

### KABEL DI STADION TELADAN HILANG:

## Gubsu Semprot Anak Buah Bobby

● Edy Sumbang Rp100 M untuk Tata Lapangan Merdeka

Medan, MIMBAR - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi 'menyemprot' anak buah Walikota Medan Bobby Nasution, gara-gara kabel listrik di Stadion Teladan hilang. Edy mengatakan hal itu menyebabkan PSMS tak bisa bermain di Medan dalam Liga 2.

Teguran itu disampaikan Edy saat rapat koordinasi bersama Walikota Bobby Nasution dan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, tentang infrastruktur terintegrasi. Edy awalnya mempertanyakan pengelolaan Stadion Teladan saat ini kepada Kadis Pertamanan Kota Medan, Husni.

"Siapa yang mengelola Stadion Teladan sekarang," kata Edy, di rumah dinas Gubsu, Medan, Senin 20/9 --dikutip laman detikcom.

■ Bersambung ke Hal 11

Jakarta, MIMBAR - PPKM untuk wilayah Jawa-Bali dan juga luar Jawa-Bali diperpanjang --dua laman berita, liputan6 dan cnni melansir kemarin petang.

### EDY SOAL BANGUNAN DI LAPANGAN MERDEKA:

## Sekalian Saja Tembak!

Medan, MIMBAR - Malam cni melukiskan Gubernur Edy Rahmayadi prihatin dengan kondisi Lapangan Merdeka Medan yang kini dipenuhi bangunan di seluruh sisinya. Banyak kegiatan tak bisa lagi dilakukan di sana seperti tembakan meriam yang biasanya dilakukan saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

■ Bersambung ke Hal 11

Perpanjangan PPKM ini dilakukan selama dua pekan mulai Selasa 21 September 2021 (hari ini) hingga 4 Oktober 2021. Dengan demikian ada beberapa penyesuaian yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk antisipasi varian baru Covid-19.

### LUAR JAWA - BALI

Kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers PPKM, Senin 20/9 --dikutip dan diposting laman liputan6 pada pukul 17:48 wib-- "Sesuai arahan presiden Joko Widodo akan dilakukan perpanjangan dua minggu ke depan, yang akan berlaku sejak 21 September hingga 4 Oktober 2021."

■ Bersambung ke Hal 11



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers PPKM secara virtual.

## Peluang Nyapres versi PKS: Anies, Sandi, hingga Salim Segaf

Jakarta, MIMBAR - Pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Ahmad Syaikh (56), bahwa duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada 2024 sebagai sebuah keniscayaan, memantik beragam reaksi.

Sejumlah elit partai politik lain, pengamat, bahkan sosok yang terkait dalam isu ini pun memberi respons berbeda-beda.

Syaikh mengaku, apa yang disampaikan cuma sebatas menjawab pertanyaan wartawan saat berada di Makassar beberapa hari lalu. Sebab, pengajuan calon presiden dan wakil presiden di PKS bukan ditentukan oleh Presiden, melainkan harus disetujui oleh musyawarah Majelis Syuro.

■ Bersambung ke Hal 11



Ahmad Syaikh. (Foto dok int)

## Tak Mau Kasi Duit, Sipir Pukuli Napi Tanjung Gusta

Jakarta, MIMBAR - Video seorang narapidana (napi) Lapas Klas 1 Tanjung Gusta Medan mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya, viral di media sosial.

Dalam video menyebutkan, napi tersebut diduga dipukuli oleh petugas atau sipir.

Video tersebut direkam oleh sesama narapidana di dalam sel tahanan.

Dalam video, terdengar suara seorang pria meminta temannya itu agar membuka bajunya. Narapidana tersebut pun lantas membuka bajunya.

■ Bersambung ke Hal 11



Tangkapan layar video yang memperlihatkan narapidana mengalami luka lebam (Istimewa)

### Jadwal Salat

13 SHAFAR 1443 H

Subuh : 04.59 WIB	Maghrib : 18.24 WIB
Zuhur : 12.19 WIB	Isya : 19.31 WIB
Ashar : 15.25 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

### Hidayah

## PDI P Menolak

Oleh Dr A Rasyid, MA



Hastu Kriyanto, memiliki jabatan selaku Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara tegas menyatakan menolak suguhan jabatan Presiden menjadi tiga priode. Pernyataan ini perlu kita acungkan jempol, jika memang pernyataan itu tidak hanya sekedar meredam kegalauan yang tengah bergulir di masyarakat.

■ Bersambung ke Hal 11

### long Dede

- NU dan Taliban sama-sama Aswaja.
- he..he..he..

### RALAT

Huruf "n" terpelanting.  
Pada berita utama Senin 20 September 2021 kemarin di halaman 1 dengan judul "Kapal China Berseliwera di Natuna," ternyata huruf "n" pada kata "Berseliwera" terpelanting alias terpotong, sehingga terbaca "Bersilewera." Kekeliruan kecil tetapi mengganggu terjadi semata-mata karena masalah teknis. Demikian agar dimaklumi.

REDAKSI.

## PPKM Diperpanjang...

Dari Halaman 1

Diketahui, tingkat vaksinasi di Sumatera Barat dan Lampung masih rendah, dibawah standar nasional dengan 20% tingkat vaksinasi dari total jumlah penduduk di provinsi tersebut.

Selain itu, ia juga meminta untuk dilakukan peningkatan fleksibilitas vaksin di tingkat TNI/Polri menjadi 25%. "Masing-masing TNI 25% dan Polri 25% dari semula 20%, sementara di lingkungan Dinas Kesehatan menjadi 50%," katanya.

PERBAIKAN

Lebih lanjut, Menko Airlangga menuturkan, terjadi tren perbaikan cukup bagus ditinjau dari tingkat perkembangan kasus di luar Jawa-Bali.

Dari total kasus aktif secara nasional, luar Jawa-Bali menyumbang sekitar 61,95% recovery rate kasus

nasional. Rinciannya, tingkat recovery rate di Sumatera menunjukkan 93,52% dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 3,49%, dan penurunan kasus aktif sejak 9-19 September 2021 sebesar 80,52%.

Sementara di Nusa Tenggara, tingkat recovery rate sebesar 95,78%, CFR 2,3%, dan penurunan kasus 86,75%. Kemudian di Kalimantan dengan recovery rate 94,27%, CFR 3,15%, dan penurunan kasus 81,48%.

Lalu, Sulawesi dengan recovery rate sebesar 94,61%, CFR 2,61%, dan penurunan kasus hingga 17 september adalah 81,13%.

Sementara di Maluku-Papua dengan recovery rate 95,59%, CFR 1,6% dan penurunan kasus 87,17%.

Katanya, "Kesembuhan nasional 95% dan luar Jawa-Bali ini 94,175 dan terkait dengan rata-rata kematian nasional 3,07% di bawah nasional 3,35%."

JAWA - BALI

Sementara itu laman berita cnni melansir, bahwa pemerintah juga resmi memperpanjang PPKM berdasarkan level di Jawa-Bali selama dua pekan hingga 4 Oktober mendatang.

Namun, Menko Marinings Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, dalam perpanjangan tersebut tak ada lagi daerah dengan level 4 pada pelaksanaan PPKM Jawa-Bali.

"Dari berbagai perbaikan, tidak ada lagi kabupaten/kota di level 4 di Jawa Bali. Semua pada level 3-2," ujar komandan PPKM Jawa Bali itu, Senin 20/9 petang.

Ia mengatakan, pemerintah akan terus menerapkan PPKM di Jawa-Bali dan juga luar Jawa-Bali selama virus corona belum sepenuhnya hilang. **(lip6/cnni)**

## PDIP Incar...

Dari Halaman 1

Dalam beberapa hari belakangan sejumlah kelompok relawan mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar untuk maju di Pilpres 2024.

Sejumlah kelompok relawan yang mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar, di antaranya relawan Jokowi Mania atau JoMan, Ganjar Pranowo (GP) Mania, dan terbaru dari Sahabat Ganjar (SG).

Deklarasi SG digelar secara virtual dan diikuti relawan dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri.

Dalam acara tersebut, pembawa acara menyebutkan deklarasi SG dari luar negeri diikuti dari: Hong Kong, Macau, Jepang, Taiwan, Inggris, Singapura, Italia, Belanda, Malaysia, Arab Saudi, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Austria, Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Prancis.

Sekjen relawan SG, Aloysius Jaka, dalam acara tersebut mengatakan SG diawali deklarasi di Yogyakarta 29 Juni 2021 lalu. Kemudian 8 Agustus 2021 dilakukan deklarasi di Bali, lalu berlanjut untuk 34 Provinsi.

"Pada 19 September ini tercatat 17 relawan luar negeri ikut mendeklarasikan," kata Jaka dalam acara deklarasi relawan SG luar negeri dan pelantikan pengurus SG yang digelar daring, Ahad 19/9.

BLITAR RAYA

Dukungan terhadap Ganjar --alumni UGM dan mantan Ketua Kagama (keluarga alumni Gajah Mada)-- sebetulnya lebih dulu mengemuka di Blitar Raya, bertepatan dengan HUT ke-76 RI. Relawan yang mengatasnamakan diri "Ganjarist," mendeklarasikan dukungannya di sebuah rumah, di Jalan Palembang, Kota Blitar.

Kemudian JoMan. Ketua Umum JoMan, Immanuel Ebenezer, menganggap dukungan untuk Ganjar maju di Pilpres 2024 tidak ada mengkhianati siapa-siapa.

Sebab, dukungan itu diberikan atas "perintah hati nurani."

"Nggak ada yang dikhianati dalam hal ini, JoMan tetap tegak lurus Jokowi, dan relawan Jokowi tetap solid dan satu suara. Sikap JoMan hari ini karena kita diperintah oleh hati nurani kita yang nggak mung-

kin kita lawan," kata Immanuel kepada wartawan, Jumat 17/9.

SANKSI DISIPLIN

Hari Senin kemarin, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (55), mengumumkan keputusan penting partai terkait Pilpres 2024. PDIP menyatakan akan memberi sanksi disiplin kepada kader mereka yang "mendeklarasikan" atau "dideklarasikan" menjadi capres atau cawapres Pilpres 2024.

Kata Hasto, Senin 20/9 --dikutip laman detikcom-- "Sikap partai sangat jelas, bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai."

Ia meneruskan, "Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin."

Hasto beralasan, keputusan itu didasarkan pada pertimbangan yang harus matang, berkaitan dengan Pilpres 2024.

Menurutnya, tanggung jawab sebagai presiden juga berat.

"Partai tidak menolerir terhadap tindakan indisipliner, mengaitkan urusan presiden dan wakil presiden harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang, terlebih dengan tanggung jawab presiden yang sangat berat untuk perbaikan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," ujarnya.

"Dengan demikian, pertimbangannya harus matang, dan benar-benar memerhatikan seluruh aspek strategis kepemimpinan negara," lanjutnya.

KURANG TEPAT

Alasan lain, PDIP menilai deklarasi dukungan capres atau cawapres saat pandemi seperti saat ini kurang tepat. PDIP sendiri saat ini sedang fokus membantu masyarakat keluar dari dampak pandemi Covid-19.

Hanya, media tidak mengutip jenis sanksi yang akan diberikan partai, misalnya apakah hanya teguran tertulis, peringatan keras, skorsing atau bahkan pemecatan sebagai anggota partai. **(dte)**

## Gubsu Semprot...

Dari Halaman 1

Husni kemudian menjelaskan, pengelola Stadion Teladan adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan. Edy kemudian menegur Husni soal masalah kabel yang hilang.

Katanya, "Saya yang (me)masang, saya juga pasang board digital. Tapi karena saat itu saya Pangkostrad tidak boleh. Saya atas nama Eldin (mantan Walikota Medan Dzulmi Eldin)," tuturnya.

Edy mengatakan kabel di stadion hilang. Menurutnya, kerusakan di Stadion Teladan membuat PSMS tak bisa main di Medan dalam Liga 2.

"Kenapa tak main di Stadion Teladan, kabelnya hilang semua. Terpaksalah PSMS berangkat ke Palembang. Tinggal main-lah di Palembang, cost lagi ke Palembang. Itu home and away, home-nya di sini kita tak bisa," ujar Edy.

Edy meminta persoalan kabel yang hilang itu segera diselesaikan.

Dia berharap PSMS bisa bermain di Stadion Teladan.

"Jadi PSMS di 2 bulan ke depan, saya berharap masuk delapan besar, home and away-nya adalah Stadion Teladan. Rumpunnya, lampunya kembalikan. Cek lagi semua ya," jelasnya.

SOAL LAPANGAN MERDEKA

Selain soal Stadion Teladan, Edy mengingatkan Bobby agar tak melupakan nilai sejarah saat menata Lapangan Merdeka.

Dia mengingatkan Bobby agar merawat sejarah Kesultanan Deli.

"Saya kecil, main bola di Lapangan Merdeka. Begitu besar, saya penggerek bendera di Lapangan Merdeka. Besar lagi saya, Letkol pangkat saya, komandan upacara saya di situ, gubernurnya Tengku Rizal Nurdin. Lebih besar lagi, saya jadi inspektur upacara," ucap Edy.

Dalam rapat ini, Edy membahas bentuk Lapangan Merdeka setelah diper-

baiki.

Dia mengatakan dana yang diperlukan untuk menata Lapangan Merdeka mencapai Rp174 miliar.

"Dari saya Rp100 miliar, sisanya Pak Bobby, ya," ucap Edy.

Dana itu nantinya digunakan membangun basemen hingga panggung rakyat di kawasan tersebut.

Basemen tersebut bakal terdiri dari 2 lantai.

Lantai pertama bakal dibangun dengan anggaran Rp112 miliar, basemen lantai dua menghabiskan Rp42 miliar dan panggung rakyat Rp20 miliar.

"Saya kasih Rp100 (miliar), saya mau ini sudah dikerjakan mulai Januari (2022)," jelas Edy.

Menurut Edy, penataan Lapangan Merdeka bakal diurus Walikota Medan Bobby Nasution.

Namun, dia meminta pembangunan tidak menghilangkan corak Melayu sebagai identitas Medan.

## Sekalian Saja...

Dari Halaman 1

"Dulu itu selalu ada tembakan meriam 17 kali dilakukan oleh Armed. Sekarang saya tanya Dan-yon kenapa tidak bisa. Beliau bilang 'Pak nanti kalau itu dilakukan retak semua kaca bangunan di sini'. Saya bilang, kenapa enggak sekalian saja kau tembak bangunannya," kata Edy saat menggelar Rapat Koordinasi Sinergi Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi

Medan - Binjai - Deliserdang (Mebidang) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Senin 20/9.

TERINTEGRASI

Dalam pertemuan itu, Edy memaparkan konsep pembangunan infrastruktur terintegrasi yang telah digagasnya. Menurut Edy, peta jalan pembangunan infrastruktur yang dimulai dari titik 0 Kota Medan, yakni Lapangan Merdeka, harus didukung oleh Pemko Medan, Pemkab

Deliserdang dan Pemko Binjai.

Katanya, "Kita sama-sama mulai ini. Masing-masing mulai dari daerahnya, nanti jumpa di tengah. Artinya masing-masing memulai, tapi sesuai dengan titik, dengan peta jalan."

Edy menegaskan, pembangunan infrastruktur terintegrasi ini menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan masyarakat pada tiga daerah yakni Medan, Binjai dan Deliserdang.

## Anies, Sandi...

Dari Halaman 1

Nah, pada musyawarah Majelis Syuro ke-5 tahun lalu, disepakati agar mengusung kader internal untuk maju dalam ketokohan dan kepemimpinan nasional, yakni Habib Dr Salim Segaf Al-Jufri.

Kata Syaikh kepada tim Blak-blakan detik.com, Sabtu malam 18/9 --dilansir Senin kemarin-- "Pada Pilkada DKI 2017, kami memang ikut mengusung pasangan Anies - Sandi. Keduanya sekarang sudah menjadi tokoh nasional dan punya rekam jejak masing-masing sehingga berpeluang (untuk 2024). Begitu juga dengan

Pak Ganjar (Pranowo), Prabowo, AHY, maupun Ridwan Kamil. Tapi kami belum memutuskan untuk 2024."

SALIM SEGAF

Terkati sosok Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf, dia membeberkan sederet prestasi, baik untuk internal PKS maupun bangsa dan negara ini.

Syaikhu antara lain memaparkan empat catatan prestasi Salim Segaf, yakni mampu mendorong jumlah dukungan suara masyarakat ke PKS dari 8,5 juta menjadi 11,5 juta pada Pemilu 2019 lalu. "Padahal saat itu PKS tengah dilan-

da konflik internal dan sejumlah survei memperkirakan suara PKS akan turun," ujar Syaikh.

Selain itu, Salim Segaf punya pengalaman birokrasi karena pernah jadi Menteri Sosial pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono.

Sebagai Mensos, Salim menelurkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terus dilaksanakan sampai sekarang untuk pengentasan kemiskinan.

Sebelumnya, Salim pernah menjadi Duta Besar di Arab Saudi.

Sebagai diplomat dia dinilai berhasil memperkuat hubungan RI dengan Saudi.

## Tak Mau...

Dari Halaman 1

Setelah baju dibuka, tampak tubuhnya penuh luka lebam.

Para narapidana lainnya pun berkumpul di sekitar sel itu.

OGAH KASI UANG

Kemudian narapidana yang diduga merekam video itu menyebutkan luka di tubuh temannya akibat dipukuli petugas.

Dia mengatakan, pemukulan itu disebabkan temannya ogah (menolak) memberi uang Rp30 juta ke sipir.

Katanya, "Inilah tindakan pegawai Lapas Klas I Medan. Kami bukan binatang, kami manusia pak. Kami digereng (ditahan) sampai bertahun-tahun di sini karena masalah kecil aja. Diminta uang 30 juta - 40 juta, baru bisa keluar. Kalau nggak, kami dipukuli seperti ini," ujarnya.

DALAMI  
Kepala Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan, Erwedi Supriyatno, mengaku, bersama tim Kanwil Kemenkumham Sumut, masih mendalami video itu.

Kata Erwedi, Ahad 19/9 --dikutip laman cnni-- "Kemarin tersebar video viral itu, untuk sementara masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan. Tapi melihat posisi dan gambar, kami benarkan itu di Lapas Klas I Medan."

Namun untuk kebenaran video itu, pihaknya masih melakukan pendalaman. Video itu, tambahya, diduga direkam di dalam sel isolasi atau pengasingan untuk napi beresiko tinggi yang biasanya dihuni napi teroris.

"Tapi untuk kebenaran video itu, kami masih lakukan pendalaman. Itu dalam sel pengasingan bagi napi beresiko tinggi karena dikhawatirkan dapat mengganggu

keamanan dan ketertiban di Lapas. Sel khusus itu biasanya diisi satu orang, ada napi teroris juga di sana," ucapnya.

MINTA KETERANGAN DUA

SIPIR  
Menurutnya, saat ini pihaknya telah meminta keterangan dua orang sipir dan dua orang narapidana.

Terkait narapidana membawa ponsel ke dalam sel, Erwedi juga mengaku masih melakukan penyelidikan.

"Itu sedang kami selidiki (napi bawa ponsel). Dari mana bisa mereka dapat handphone, tidak boleh itu. Saat ini dua petugas diperiksa, napi dua, nanti akan kita kembangkan lagi. Terkait petugas disebut minta uang 30 juta, itu saya pastikan tidak benar," jelasnya.

AKAN TINDAK

Erwedi mengungkapkan akan mem-

berikan tindakan tegas bagi petugas jika memang melakukan perbuatan seperti yang disebutkan dalam narasi video

"Yang jelas sedang dilakukan pemeriksaan bersama tim dari Kanwil. Saat ini masih dalam pemeriksaan. Jika nanti video itu benar, peristiwa itu misalnya dilakukan petugas tentu ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Dan tentu akan kita berikan tindakan. Kita sedang pendalaman karena itukan hanya video tapi kita belum tau petugasnya siapa," paparnya.

UNTUNG ADA HP

Seorang pembaca MimbarUmum yang diberitahu ihwal liputan ini, kemarin, justru berpendapat, "Untung ada handphone yang bisa merekam, meski mungkin ilegal. Kalau tidak, mana mungkin praktek memeras dan menganiaya ini terbuka?" **(cnni/cp)**



## PDI P...

Dari Halaman 1

Selama ini ada muncul kesan kuat keinginan menjadi jabatan Presiden Jokowi ditambah lagi satu priode hingga menjadi tiga priode. Tetapi terjadi pro kontra di tengah masyarakat, hingga memunculkan kegaduhan. Semacam perang komunikasilah itu.

Bagi yang pro berargumen bahwa jabatan dua priode Presiden Jokowi tidak berjalan efektif, karena ada gangguan pandemi Covid 19. Tetapi ini tidak bisa berjalan seandainya menambah-nambah jabatan presiden, karena harus terlebih dahulu kembali melakukan amandemen UUD 1945.

Bagi mereka yang kontra, berpendapat tidak kuat alasan bagi Jokowi untuk menambah lagi jabatannya menjadi tiga priode. Pasalnya sangat bertentangan dengan UUD 1945. Lagian menurut mereka, dua priode sudah cukup membuat rakyat menderita, maka tidak perlu ditambah lagi.

Pernyataan Hastu tentu saja sedikit dapat menyelesaikan persengketaan antara yang pro dan yang kontra. Tetapi itu akan masih pernyataan Hastu. Belum muncul pernyataan dari Ketua Umumnya PDI Perjuangan. Apakah mereka memang sudah final, tidak menginginkan Presiden Jokowi tambah jabatan jadi tiga priode. Kita berharap permainan politik kali ini harus berada dalam ranah kejujuran, jika tidak rakyat akan menjadi kecewa.

Kekecewaan demi kekecewaan yang dialami rakyat seharusnya tidak boleh berulang terus menerus. Karena kecewaan itu akan menambah beban penderitaan. Kita harus jujur membangun negeri ini, sebab dengan kejujuranlah kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

## Pengelolaan Stadion Teladan Dilimpahkan ke Dispora

Medan, MIMBAR - Pengelolaan sembilan fasilitas olah raga milik Pemerintah Kota Medan yang awalnya dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dialihkan menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Muhammad Husni mengatakan, terdapat sembilan fasilitas olahraga yang telah dialihkan ke Dispora.

"Ada sembilan fasilitas olahraga yang merupakan aset Pemko Medan dan selama ini kami kelola dialihkan pengelolaannya ke Dispora," ujar Husni, Senin (20/9/2021).

Husni menyebutkan beberapa fasilitas olahraga yang dilimpahkan kewenangannya ke Dispora di antaranya Stadion Teladan, stadion dan lapangan tenis kebun bunga, lapangan sepak bola di Kecamatan Marelan, lapangan sepak bola di Kecamatan Medan Tuntungan, lapangan sepak bola di Kecamatan Medan Deli, Lapangan Gajah Mada di Jalan Krakatau. "Totalnya ada sembilan. Ke depan pemeliharaan fasilitas olahraga itu akan menjadi tanggung jawab Dispora, saat ini masih proses peralihan," katanya.

Peralihan itu, kata Husni, ditandai dengan pembuatan berita acara serah terima (BAST) pada 6 September 2021 lalu. "Resminya peralihan ini sejak 6 September," ungkapnya.

Wali Kota Medan Bobby Nasution, mengatakan peralihan pengelolaan fasilitas olahraga dilakukan agar dana bantuan Kemendikpora dapat turun ke Medan.

Menurut dia, selama fasilitas olahraga dikelola DKP Medan, bantuan tidak dapat disalurkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Medan, Topan Ginting, menambahkan peralihan pengelolaan fasilitas olahraga dari DKP baru saja terjadi beberapa waktu lalu.

"6 September secara resmi mengelola sarana olahraga yang selama ini dikelola dinas pertamanan, dengan dikelolanya maka kita yakin ke depan memacu semangat ke depan," ujar Topan.

Menurut Topan, selama fasilitas olahraga yang merupakan aset Pemko Medan dipegang oleh DKP, maka bantuan dari Kemendikpora tidak bisa diterima.

"Bantuan bisa diberikan kalau sudah dikelola dispora," ungkapnya. (tr/j)



Kepala DKP Kota Medan, Muhammad Husni.

## Bobby Nasution Optimis PPKM di Medan Turun Level



Medan, MIMBAR - Melihat trennya trend kasus Covid-19, Wali Kota Medan Bobby Nasution optimis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Medan akan turun dari Level IV ke III. "Insya Allah. Mudah-mudahan bisa turun. Namun kami tetap menunggu Imendagri yang juga akan diteruskan oleh Gubsu. Prinsipnya kami menunggu. Mudah-mudahan turun," ujar Bobby Nasution usai mengikuti rapat koordinasi dengan Gubsu H. Edy Rahmayadi, Senin (20/9) di aula T. Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu.

Selain menurunnya trend kasus Covid-19 di Medan, pekerjaan-pekerjaan rumah yang telah diberikan juga telah diselesaikan sesuai dengan yang telah ditentukan.

"Pendataan telah diperbaiki. Kalau dilihat dari kategori-kategori lain, mudah-mudahan bisa turun ke Level III. Tapi kita tunggu saja dari Mendagri penetapannya," tambahnya.

Menyinggung tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit Covid-19 di Medan, Bobby Nasution mengatakan, sudah turun jauh, yakni di bawah 30 persen. "ICU yang memang masih mendekati 30 persen, untuk rawat inap bahkan di bawah 25 persen. Sedangkan untuk kesembuhan terus meningkat. Fatality rate kita terus menurun, sudah di bawah 2 persen. Tingkat kesembuhan sudah 98 persen lebih," sebut Bobby Nasution.

Dia menambahkan, tingkat keterisian tempat isolasi terpusat juga terus menurun. Keadaan yang kondusif ini dipengaruhi dengan menurunnya angka konfirmasi positif Covid-19.

"Mudah-mudahan ini bisa kita jaga terus, kita stabilkan terus. Jangan euforia. Ini terus kita ingatkan kepada teman-teman di Pemko dan masyarakat. Jangan sudah turun, tidak lagi menjaga proses. Proses harus tetap kita jaga," sebutnya seraya menambahkan, Pemko Medan terus juga terus menggalakkan vaksinasi baik secara massal maupun di seluruh fasilitas kesehatan.

Sebelumnya, Bobby Nasution, Bupati Deliserdang H. Ashari Tambunan, dan Sekda Binjai Irawansyah Nasution mengikuti rapat koordinasi pembangunan infrastruktur terintegrasi yang dipimpin Gubsu Edy Rahmayadi.

Beberapa hal yang dibahas dalam rapat ini antara lain rencana revitalisasi Lapangan Merdeka. Di samping itu turut pula dibahas tentang program normalisasi tiga sungai yakni Sungai Bedera, Sungai Babura, dan Sungai Deli. (R/A-01)

## Wali Kota Medan Dukung Survei Kepatuhan yang Dilakukan Ombudsman RI

Medan, MIMBAR - Wali Kota Medan, Bobby Nasution mendukung survei kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan ombudsman RI. Melalui survei ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dilingkungan Pemko Medan.

Hal ini disampaikan Bobby Nasution saat menerima kunjungan dari perwakilan Ombudsman RI Pusat di Kantor Wali Kota Medan, Senin (20/9).

Dalam kunjungan tersebut, Andi selaku Asisten Ombudsman RI Pusat yang didampingi Edward selaku Asisten Ombudsman RI Sumut dan Dadan S selaku anggota Ombudsman RI, menyampaikan bahwa Ombudsman RI secara nasional akan melaksanakan survei kepatuhan pelayanan publik bagi Kementerian, Lembaga dan Pemda. Hasil dari survei ini nantinya akan menentukan level dari instansi tersebut. "Melalui survei ini Ombudsman ingin mendorong agar pelayanan publik semakin meningkat dan menaik levelnya," kata Andi.

Menanggapi hal tersebut, Bobby mengatakan, akan terus mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin baik di lingkungan Pemko Medan, khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu Bobby sangat mendukung dilakukannya survei ini sebagai upaya peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat. "Saat ini Pemko Medan menjalankan tugas dengan tagline kolaborasi. Dan apapun hasil pemeriksaan ombudsman, saya berharap dapat meningkatkan pelayanan publik di jajaran Pemko Medan, sehingga Pemko Medan dapat tetap berada di level hijau," imbuh Bobby yang didampingi Sekda Kota Medan Wiriyah Alrahman dan Plt Inspektur Kota Medan Laksamana Putra. (R/A-01)

## PW GPK SUMUT DILANTIK

## Jonson Sihaloho: Siap Bantu Raih 10 Kursi Dewan PPP Sumut

Medan, MIMBAR - Ketua PW Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Sumut Bung Jonson Sihaloho, SH.I pada sambutan pelantikannya, Sabtu (18/9) menegaskan akan maksimal membantu perolehan 10 kursi DPRD Sumut Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara Medan, pada pemilu 2024.



Pelantikan PW GPK Sumut, di Dharma Deli Hotel Medan, Sabtu (18/9), di Medan. (Mimbar/ist)

"Target itu akan dilakukan dengan upaya yang serius dari seluruh kader GPK se-Sumut dengan segera merapikan struktur organisasi GPK serta turun secara bersama ke tengah-tengah masyarakat dengan melaksanakan program kerja yg akan dibuat pada Rapat Kerja usai pelantikan ini," kata Jonson Sihaloho pada sambutan pelantikan PW GPK Sumut, sekaligus Rapat Kerja Wilayah, di Dharma Deli Hotel Medan, Sabtu (18/9), di Medan.

Jonson yang merupakan alumni Universitas Islam Negeri (UIN ) Sumut ini, menjelaskan 10 kursi itu berasal dari 10 Daerah Pemilihan (Dapil).

Maka, dari 10 Dapil yang dianggap merupakan daerah yang berpotensi besar PPP Sumut meraih kursi DPRD Sumut, akan mencurahkan secara maksimal kerja-kerja organisasi GPK Sumut.

"Pemilu 2024 itu sudah sangat dekat sekali, tidak ada waktu lagi untuk bersantai. GPK Sumut akan terus bekerja menyongsong pemilu 2024. Agar PPP Sumatera Utara bisa meraih 10 kursi DPRD Sumut," ujar Jonson dengan optimis.

Ketua Umum PP GPK, H. Andi Surya Wijaya Ghalib, SH, MH diwakili oleh Ketua DPW PPP Sumut Jafaruddin Harahap S.Pd, M.Si melalui virtual, melantik kepemimpinan PW GPK Sumut. Pelantikan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) PP GPK Nomor: 048/SKEP.PP.GPK/II/2021, tentang Pengangkatan dan Pengesahan PW GPK Sumatera Utara, periode: 2021-2026.

Hadir pada acara pelantikan PW GPK Sumut, Ketua DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap, Ketua MPO PW GPK H.Yulizar P Lubis, Gubsu diwakili oleh Zulham Effendi Siregar (Kabid Organisasi Kesbangpol), para pengurus DPW PPP Sumut, dan Sayap Partai, AMK, GMPI, Wanita Persatuan Pembangunan, serta para Ketua DPC PPP Kabupaten/Kota dan undangan lainnya.

Ketua DPW PPP Sumut dalam sambutannya meminta kepada pengurus GPK yang baru dilantik, untuk bisa menjalankan amanah ini dengan baik, tidak hanya GPK saja, termasuk juga Sayap Partai, seperti, AMK, GMPI dan Wanita Persatuan Pembangunan. Selain itu, kader-kader GPK harus berada tampil di masyarakat, GPK (Gerakan Pemuda

Ka'bah) harus bersinergi untuk membesarkan partai PPP di pemilu 2024, bagaimana kita bisa mengembalikan citra partai dan menjadi pemenang nantinya, ujar Jafaruddin Harahap yang juga merupakan anggota DPRD Sumut.

Jafaruddin juga mengingatkan, jangan ada kader-kader Partai Persatuan Pembangunan yang merusak nama baik partai, karena akan sangat merugikan bagi citra partai.

Sedangkan Ketua Umum PP GPK H. Andi Surya Wijaya Ghalib dalam sambutannya, menginstruksikan untuk menghindari konflik, hindari perpecahan, agar kita bisa bangkit kembali.

"Saya berharap, segera penuh pimpinan cabang di tingkat Kabupaten/Kota, untuk dapat segera terbentuk, bahkan, sampai ke tingkat kecamatan GPK berdiri, tetap solid dan jaga nama baik organisasi," ujar Ketua Umum GPK.

Komposisi Kepengurusan PW GPK Sumut, periode: 2021-2026. Ketua Jonson Sihaloho SH.I, dan beberapa Wakil Ketua di antaranya Dr. Joko Susanto, M.I.Kom, Arwinsky Putra Habibuan, ST, Sekretaris Abidzar Al Ghifari Sembiring, S.Sos, dan beberapa Wakil Sekretaris di antaranya Ahmad Ruliat Bendahara, Muhajir Sitorus dan unsur pengurus bidang lainnya. (gnt)

## Pemko Medan Targetkan Angka Kemiskinan Turun di Akhir Tahun 2021

Medan, MIMBAR - Pemko Medan menargetkan angka kemiskinan pada akhir tahun 2021 dapat turun sebesar 0,12 persen, yakni dari 8,1 persen di tahun 2020 menjadi 7,98 persen pada akhir tahun 2021. Dengan upaya yang sudah dilakukan di berbagai sektor, Pemko Medan optimis, target tersebut akan tercapai.

"Upaya yang sudah dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan seperti bantuan dan beasiswa terhadap siswa miskin agar tidak putus sekolah, pelatihan keterampilan dan bantuan bagi warga kurang mampu, pemberian bantuan asupan pangan bagi keluarga rawan pangan serta jaminan kesehatan gratis bagi keluarga kurang mampu," kata Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, menanggapi Pemandangan Umum Fraksi PDI-P di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Senin (20/9).

Dalam sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim, SE dan dihadiri Para Wakil Ketua DPRD dan sejumlah Anggota DPRD Medan ini, Aulia Rachman juga menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi PDI-P terkait dengan Strategi dan langkah yang dilakukan Pemko Medan untuk menjaga Laju Pertumbuhan ekonomi.

Dijelaskan Aulia Rachman, langkah dan strategi

Pemko Medan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi kembali normal dan juga mengatasi pengangguran, antara lain dengan memperbanyak kegiatan pelatihan di bidang peningkatan SDM dan ketenagakerjaan, baik formal maupun informal. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Tenaga Kerja (BBPLK) untuk membuat Skill Development Center (SDC).

"Strategi yang dilakukan adalah dengan mendirikan talent hub, dimana akan menjadi solusi menciptakan peluang pekerja mandiri dengan berwirausaha. Selain itu creative hub juga akan dilakukan agar diketahui potensi di wilayah sehingga akan mendorong kreativitas masyarakat. Sedangkan untuk mengatasi tingkat inflasi adalah dengan melaksanakan pasar murah di 21 kecamatan untuk dapat mengontrol harga dan juga memastikan barang-barang kebutuhan masyarakat,"

urai Aulia Rachman sembari mengungkapkan, Pemko Medan juga akan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM.

Untuk optimalisasi pelaksanaan vaksin Covid-19 dan ketersediaan vaksin, Aulia Rachman menjelaskan, Pemko Medan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk mendapatkan alokasi vaksin. Sebab saat ini Pemko Medan terus gencar melakukan vaksinasi di seluruh Puskesmas di Kota Medan.

"Dalam rangka pengendalian penyebaran maupun penanganan pasien Covid-19 telah dilakukan program 3T (Test-Tracing-Treatment) yang juga melibatkan TNI-POLRI. Selain itu Pemko Medan juga telah menyediakan tiga lokasi terpusat, yakni gedung P4TK, Hotel Sochi, dan KM Bukit Raya, dimana layanan pada isolasi terpusat diberikan secara gratis," ujar Aulia Rachman menanggapi Pemandangan Umum Fraksi PDI-P. (R/A-01)

## Kapolda Sumut Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 202

Medan, MIMBAR - Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2021 di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Senin (20/9).

Turut hadir dalam apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2021, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, Waka Polda Sumut Brigjen

Pol Dadang Hartanto, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Valentino Tareada, PJU Polda Sumut, unsur potensi masyarakat serta pejabat lainnya.

Panca mengatakan, Polda Sumut menggelar operasi Patuh Toba selama 14 hari di seluruh wilayah Sumut. Personil yang bertugas saat operasi diminta untuk bersikap humanis. "Kegiatan apel gelar pasukan apel Toba dilak-

sanakan berdasarkan surat telegram Kapolri," katanya.

Akan ada 1295 personil kepolisian yang dibantu TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang bertugas saat operasi Patuh Toba yang dilakukan mulai 20 September 2021 hingga 3 Oktober 2021.

Panca mengatakan, fokus utama operasi adalah penempatan protokol kesehatan.

"Pola operasi yang dilaksanakan adalah 100 persen tindakan simpatik humanis. Tilang yang kita berikan itu adalah alternatif terakhir," ujar Panca.

"Paling utama adalah menghindari kerumunan masyarakat dan menjaga mobilitas masyarakat agar tetap mematuhi peraturan pemerintah," tambahnya. Panca kemudian memberikan arahan agar personil yang bertugas di lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas. Selain itu personil juga diminta melakukan edukasi tentang protokol kesehatan.

"Pertama berikan edukasi protokol kesehatan dan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui bakti sosial, pembagian masker dan pembagian stiker," jelas Panca.

Panca kemudian meminta personil yang bertugas untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat saat operasi. Hal ini untuk mengambil rasa simpati masyarakat untuk aparat kepolisian.

"Berikan layanan terbaik kepada masyarakat untuk menciptakan rasa simpatik kepada aparat penegak hukum khususnya polisi," pungkasnya. (japs)



## Imbas Covid, PAD Kota Medan Menurun

Medan, MIMBAR - Pandemi Covid yang telah melanda hampir dua tahun, mengakibatkan penurunan penerimaan dari sektor pajak daerah. Pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak ekonomi terhadap ekonomi usaha tentang pemberantasan jam operasional usaha, diikuti dengan penutupan tempat hiburan. Hal ini berakibat pada penurunan drastis omzet pendapatan pelaku usaha.

"Pemko Medan memiliki langkah untuk meningkatkan PAD, diantaranya menambah opsi layanan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Selain itu melaksanakan pendataan ulang terhadap wajib pajak maupun jenis usaha yang merupakan objek pajak daerah dengan membentuk tim percepatan untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah," ujar Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terkait dengan langkah-langkah realisasi PAD dalam sidang Paripurna dengan agenda Nota Jawa-

ban Kepala Daerah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun anggaran 2021 di ruang Sidang Paripurna DPRD, Senin (20/9).

Aulia Rachman menambahkan, Pemko Medan juga akan memberikan bantuan usaha kepada UMKM, dalam penanganan dampak ekonomi dengan penggunaan dana belanja tidak terduga tahun anggaran 2021 sebesar Rp 11 milyar.

"Saat ini pelaku UMKM yang terdaftar di e-katalog sebanyak 150 UMKM yang direncanakan akan diberikan bantuan usaha sebesar Rp 2.500.000 per UMKM. Selain itu, bantuan juga akan diberikan kepada pelaku UMKM yang telah melalui proses penyeleksian terhadap produk KUR sebesar Rp 750 ribu per UMKM," tambah Aulia Rachman.

la juga menjelaskan terkait dengan infrastruktur jalan

dan penanganan banjir, bahwa pekerjaan pengaspalan jalan tahun anggaran 2021 telah direncanakan penanganan sepanjang 34,7 Km dan penanganan trotoar sepanjang 3,26 Km serta jembatan sebanyak 12 unit, dimana beberapa ruas jalan dan drainase telah ditandatangani dan akan terus diupayakan pekerjaannya sesuai rencana.

"Untuk penanganan banjir Pemko Medan saat ini mendapat dukungan penuh dari kementerian pusat melalui balai wilayah sungai Sumatera II (BWSS) II untuk merancang normalisasi seluruh sungai di kota Medan. Dimana Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam proses penanganan banjir dengan membuat Larap (Land Acquisition And Resettlement Action Plan). Dimana saat ini sedang dirancang penanganan banjir di sungai Deli, Sungai Babura dan Sungai Bedera serta ROB Belawan," jelas Aulia Rachman sembari menjelaskan, pelayanan kebersihan kewenangannya dilimpahkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Kecamatan. (R/A-01)